

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 yaitu (a) bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan (b) bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Suatu wilayah dikatakan berhasil dalam pembangunan ketahanan pangan jika adanya peningkatan produksi pangan, distribusi pangan yang lancar serta konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi pada seluruh masyarakat (Rahmawati, 2012).

Menurut Saliem dkk (2012) walaupun di tingkat wilayah status pangan tergolong ketahanan pangan terjamin, tetapi masih ditemukan rumah tangga yang tergolong rawan pangan dengan proporsi yang cukup tinggi. Sehingga selain dilakukan pengukuran ketahanan pangan pada wilayah, juga penting dilakukan

pengukuran ketahanan pangan pada tingkat yang lebih rendah hingga tingkat rumahtangga. Karena persoalan pangan yang dialami pada suatu wilayah hanya dapat dipahami dengan menelaah permasalahan pangan pada tingkat rumahtangga, dimana tingkat rumahtangga merupakan titik berat kondisi ketahanan pangan. Sistem ketahanan pangan dikatakan baik apabila mampu memberikan jaminan bahwa semua penduduk atau masyarakat setiap wilayah tanpa kecuali di setiap saat, pasti menepatkan makanan yang cukup dengan norma gizi untuk kehidupan yang sehat, tumbuh dan produktif. Ancaman risiko atau peluang kejadian sebagaimana penduduk menderita kurang pangan merupakan indikator keragaman akhir dari sistem ketahanan pangan.

Ketersediaan pangan (*food availability*) merupakan subsistem ketahanan pangan yang terkait dengan sistem produksi baik produksi sendiri atau hasil yang diproduksi daerah setempat maupun pasokan dari luar wilayah atau impor. Selain itu ketersediaan pangan suatu wilayah juga dapat dihasilkan dari cadangan pangan rumahtangga dan bantuan dari pihak tertentu dalam bantuan pangan. Ketersediaan pangan menurut suhardjo (2010) daerah yang memiliki perbedaan kondisi agroekologi, akan memiliki potensi produksi pangan yang berbeda. Kebutuhan pangan banyak tergantung pada apa yang akan dibelinya, maka penghasilan (daya beli) harus sanggup membeli bahan makanan yang dapat mencukupi baik kuantitas maupun kualitasnya (Suhardjo, 2010).

Akses pangan (*food access*) Akses pangan (*food access*) yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumberdaya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya. Akses rumahtangga

dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial.

Menurut Abdulsyani (2007), status sosial merupakan tempat seseorang secara umum di dalam masyarakatnya yang berhubungan dengan orang-orang lain, hubungan dengan orang lain dalam lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajibannya. Status sosial ekonomi menurut Soekanto (2007) berarti kedudukan suatu individu dan keluarga berdasarkan unsur-unsur ekonomi. Menurut pendapat Reddy (2013), kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah suatu usaha bersama dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi atau mengurangi kesulitan hidup, dengan lima parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan tingkat pendapatan.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu untuk melakukan penelitian **“Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Tingkat Ketersediaan dan Akses Pangan Rumah tangga Petani Padi pada Tipe Agroecosistem Pegunungan (Studi Kasus Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi rumah tangga petani padi pada tipe agroecosistem pegunungan di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone?
2. Bagaimana ketersediaan pangan rumah tangga petani pada tipe agroecosistem

- pegunungan di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone?
3. Bagaimana akses pangan rumahtangga petani padi pada tipe agroekosistem pegunungan di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone?
 4. Bagaimana pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap ketersediaan pangan di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone?
 5. Bagaimana pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap akses pangan di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi rumahtangga petani padi pada tipe agroekosistem pegunungan di Desa Mattampawalie, Kecamatan lappariaja, Kabupaten Bone.
2. Menganalisis ketersediaan pangan rumahtangga petani pada tipe agroekosistem pegunungan di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
3. Menganalisis akses pangan rumahtangga petani padi pada tipe agroekosistem pegunungan di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
4. Menganalisis pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap ketersediaan pangan di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
5. Menganalisis pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap akses pangan di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap akses dan ketersediaan pangan rumahtangga petani padi pada tipe agroekosistem.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan pemahaman tentang pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap akses dan ketersediaan pangan rumahtangga petani padi pada tipe agroekosistem pegunungan.